

**Keputusan Wali Kota
No. 000.7.2/446/2025
Lampiran XXIV**



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SALATIGA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi UKM) Kota Salatiga Tahun 2026 adalah dokumen hasil perencanaan Dinas Koperasi UKM yang berisi uraian rinci berbagai kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Penyusunan rencana kerja Tahun 2026 didesain untuk mendukung Tema Pembangunan Kota Salatiga berdasarkan RPJMD 2025-2029 yaitu *“Peningkatan Pembangunan SDM dan Pengelolaan Potensi Perekonomian Daerah Didukung Pemerintahan Berintegritas dan Infrastruktur Berkualitas”*. Renja Dinas Koperasi UKM 2026 juga mendukung kebijakan yang difokuskan dalam rangka mencapai peningkatan pembangunan SDM dan pengelolaan potensi perekonomian daerah difokuskan pada pengembangan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta pemberdayaan kewirausahaan melalui akses pendanaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dinas Koperasi UKM hendak berkolaborasi dengan unsur-unsur lain untuk menciptakan dan memperkuat pertumbuhan serta pengembangan ekonomi, khususnya ekonomi yang berbasis kerakyatan, yang merupakan gambaran dari koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Penyusunan Renja Dinas Koperasi UKM mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah Kota Salatiga, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga tahun 2025-2029, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga tahun 2025-2029 yang secara simultan disusun.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029, Visi Wali Kota Salatiga yang sesuai dengan tupoksi Dinas Koperasi UKM adalah *“Transformasi Sosial dan ekonomi yang inklusif”*, dengan misi *“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM*. Pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga merupakan hal yang perlu dipertahankan dan dioptimalkan. Melalui penguatan UMKM dan Koperasi, diharapkan dapat

mendukung perwujudan pembangunan ekonomi di Kota Salatiga dan koperasi serta UMKM dapat berdaya saing baik di tingkat regional maupun nasional.

Tujuan merupakan pernyataan tentang kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan misi, pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi. Tujuan Dinas Koperasi UKM berdasarkan misi yang tercantum dalam Misi RPJPD Kota Salatiga adalah pengembangan ekonomi lokal yang belum optimal di Kota Salatiga, utamanya terkait dengan permodalan dan kualitas produk UMKM.

Sasaran merupakan gambaran hal-hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Sasaran Dinas Koperasi UKM yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah “Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif dan Meningkatnya jumlah UKM”.

Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dinas Koperasi UKM) berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga menjalankan tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Menyadari tugas Dinas Koperasi UKM sangat strategis, maka dituntut profesional dalam pengembangan dan pemberdayaan usaha terbanyak di kota sejuik ini. Profesionalisme penting agar tugas yang dijalankan berhasil.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 Tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2820 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023– 2043;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutaman Gender;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;

19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
21. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bawah Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Adapun maksud dan tujuan disusun Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga 2026 sebagai berikut:

A. Maksud

- a. menyediakan suatu Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis;
- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan program kerja tahunan;
- c. menyiapkan semua faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi serta meminimalkan permasalahan yang dimiliki.

B. Tujuan

- a. Sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja dan dasar penyusunan rencana pembangunan tahunan;
- b. Tersedianya dokumen perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan menentukan arah kegiatan dalam jangka waktu 1 tahun;
- c. Sebagai acuan yang dapat digunakan sebagai pengelolaan sumber daya dan pola pelayanan masyarakat secara prima sehingga dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi serta mengakomodasi perbedaan kepentingan serta mendorong proses pengambilan keputusan secara benar dan teratur dalam pencapaian hasil yang maksimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI UKM TAHUN 2024.

Berisi rewiu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UKM Tahun 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2025, mengacu pada APBD Tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Koperasi UKM berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Koperasi UKM pada tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Berisi tentang Telaaj Kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi UKM, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang rencana program dan kegiatan beserta indicator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2026 dan perkiraan maju Tahun 2027

BAB V PENUTUP

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI UKM
TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi UKM Tahun 2024.

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024, dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025) dengan mengacu pada APBD tahun 2025 yang pada saat penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Selanjutnya, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun-tahun sebelumnya. Indikator kinerja Dinas Koperasi selama lima tahun mengacu pada tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Koperasi UKM 2023-2026. Tujuan dan Sasaran tersebut, adalah :

1. Tujuan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk

2. Sasaran

- a. Meningkatnya jumlah koperasi aktif
- b. Meningkatnya jumlah UKM

Indikator:

- a. Persentase Koperasi Aktif
- b. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Dalam mencapai target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga 2023-2026, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 7 (tujuh) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan yang mendukung kegiatan tahun 2024. Adapun 7 program yang dilaksanakan adalah:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
- 4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
- 5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
- 7. Program Pengembangan UMKM.

Tabel 2.1
Realisasi Indikator Kinerja Dinas Koperasi UKM Tahun 2024

No	Uraian	Indikator	2024			2025 (Sampai TW II)		
			Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat Capaian (%)
	Sasaran							
1	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase Koperasi Aktif	71,11	53,07	74,63%	71,67	63,58	88,71
2	Meningkatnya jumlah UKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	96	99,77	103,9%	96	99,87	104,03
	Program							
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,40	85,42	102,4%	83,42	86,67	103,78
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	52	73,68	141,69%	53	50,53	95,34
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang Telah dilakukan Penilaian Kesehatan	30,70	52,63	171,43%	35,09	13,68	38,99
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengelola Koperasi yang Mengikuti Pelatihan	37,59	83,70	222,66%	38,85	18,48	47,57
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Akses Pasar Anggota Koperasi	50	50	100%	75	123	164
6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan Akses Pembiayaan	21	24,80	118,09%	23	25,56	111,13
7.	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	30,85	47,35	153,48%	31,06	47,35	64,62

Berdasarkan tabel di atas, dari semua indikator sasaran tahun 2024 terdapat satu sasaran yang tidak tercapai yaitu persentase koperasi yang aktif dengan capaian 74,63%. Hal tersebut disebabkan ada beberapa koperasi aktif yang semakin berkembang dan keanggotaannya bertambah tidak hanya warga ber-KTP Salatiga sehingga Badan Hukum berpindah ke Provinsi, selain itu ada beberapa koperasi yang mengalami penurunan dan tidak melaksanakan RAT (tidak aktif)

Sedangkan semua indikator program tahun 2024 yang menjadi ukuran kinerja Dinas Koperasi UKM tercapai melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan:

1. Komitmen pemimpin dan semua pegawai Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga untuk melaksanakan tupoksinya;
2. Sumberdaya Manusia meski dari jumlah personal sangat kurang namun mampu mendukung terhadap pencapaian target tersebut.

Sedangkan Tingkat capaian tahun 2025, ada beberapa indikator yang masih jauh dari target yaitu persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian karena mengutamakan program unggulan Presiden yaitu pembentukan koperasi merah putih yang disebabkan keterbatasan personil. Sedangkan persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan masih rendah karena kegiatan akan dilaksanakan di Triwulan ke-3. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dengan waktu yang tersisa di Tahun 2025 adalah:

1. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai khususnya yang membidangi kegiatan untuk melaksanakan semua kegiatan;
2. Konsisten mengawal ketercapaian program/ kegiatan, melakukan evaluasi dokumen dan pengendalian kegiatan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan UKM Kota Salatiga dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga s.d tahun 2024 dapat dilihat pada table T-C.29. Secara umum pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2024 dapat terealisasi 100% dibandingkan dengan target yang tertuang di dalam Renstra 2023-2026. Bila dibandingkan dengan target indikator kinerja, maka pencapaian target pada tahun 2024, dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
s/d TAHUN 2025

Kode					Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (lalu/n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2025 (berjalan/n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2025 (berjalan/n-1)	
									Target Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100
2					Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2	17				Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100 %	100%	100%	100%	100	100 %	100 %	100,00
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,45		83,40	85,42	102,4	83,42	83,42	99,96
2	17	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	12 dokumen	100,00
2	17	01	2.01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	14 dokumen	87,50
2	17	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100 %	100	100 %	100 %	100,00
2	17	01	2.02	0001	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	25	23 orang	23 orang	100	23 orang	71 orang	71,00

2	17	01	2.02	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	6 dokumen	75,00
2	17	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi barang milik daerah	100%	100%	100%	100 %	100	100 %	100 %	100,00
2	17	01	2.03	0002	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	75,00
2	17	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	100 %	100	100 %	100 %	100,00
2	17	01	2.06	001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3 paket	75,00
2	17	01	2.06	002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	2 jenis	0	0		0	2 jenis	100,00
2	17	01	2.06	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3 paket	75,00
2	17	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	2 paket	2 paket	100	2 paket	5 paket	125,00
2	17	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3 paket	75,00
2	17	01	2.06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	3 dokumen	75,00
2	17	01	2.06	0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	75,00
2	17	01	2.06	0009	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	75,00
2	17	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya mesin penghancur kertas	100%	100%	100%	100 %	100	100 %	100 %	100,00
2	17	01	2.07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Terwujudnya pengadaan mebelair kantor	0	4 jenis	10 unit	10 unit	100	2 unit	16 unit	100,00
2	17	01	2.07	0006	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 unit	1 paket	9 unit	9 unit	100	3 unit	13 unit	68,42
2	17	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100 %	100	100 %	100 %	100,00

2	17	01	2.08	0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	75,00
2	17	01	2.08	0002	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	75,00
2	17	01	2.08	0003	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	100	1 laporan	1 laporan	100,00
2	17	01	2.08	0004	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3 laporan	75,00
2	17	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100 %	100	100 %	100 %	100,00
2	17	01	2.09	0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100	4 unit	12 unit	75,00
2	17	01	2.09	0002	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	3 unit	75,00
2	17	01	2.09	0005	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Dipelihara	0	2	0	0	100	0	2 unit	100,00
2	17	01	2.09	0006	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	15 unit	25 unit	25 unit	100	15 unit	55 unit	91,67
2	17	01	2.09	0009	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	3 unit	75,00
2	17	01	2.09	0010	Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	3 unit	150,00
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	54% %	70,65 %	52%	73,68 %	141,69	53 %	53 %	53,00

2	17	03	2.01		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian koperasi	120 koperasi	60 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	100	50 koperasi	140 koperasi	116,67
2	17	03	2.01	0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/ Kota	120 koperasi	60 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	100	50 koperasi	140 koperasi	116,67
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	39,47% %	67,39 %	30,70%	52,63 %	171,4	35,09 %	35,09 %	35,09
2	17	04	2.01		Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayahnya Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian/pemeriksaan kesehatan koperasi	150 koperasi	30 koperasi	50 koperasi	50 koperasi	100	50 koperasi	130 koperasi	86,67
2	17	04	2.01	0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	150 koperasi	30 koperasi	50 koperasi	50 koperasi	100	50 koperasi	130 koperasi	86,67
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	40,10% %	85,6 %	36,34%	83,70 %	230,32	38,85 %	38,85 %	38,85
2	17	05	2.01		Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pelatihan dan sosialisasi	400 orang	210 orang	170 orang	170 orang	100	90 orang	470 orang	117,50
2	17	05	2.01	0001	Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	400 orang	210 orang	170 orang	170 orang	162	90 orang	470 orang	117,50
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase akses pasar anggota koperasi	100% %	25 %	50%	50 %	100,00	75 %	75 %	75,00
2	17	06	2.01		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Terlaksananya peringatan hari koperasi	8 kali	2 kali	2 kali (gelar produk di hari koperasi dan PRPP)	2 kali	100	2 kali	6 kali	75,00

2	17	06	2.01	0005	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 unit usaha	10 unit usaha	10 unit usaha	10,00 unit usaha	100	10 unit usaha	30 unit usaha	75,00
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	24% %	25,31 %	21,00%	24,80 %	118,10	23 %	23 %	23,00
2	17	07	2.01		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Terlaksananya keikutsertaan pameran, sertifikasi halal, badan hukum kelompok UMKM, penyelenggaraan pameran	300 unit usaha	75 unit usaha	202 unit usaha	339 unit usaha	103	52 unit usaha	466 unit usaha	155,33
2	17	07	2.01	0001	Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	4 dokumen	1 dokumen	0	0	100	0	1 dokumen	25,00
2	17	07	2.01	0003	Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	300 unit usaha	58 unit usaha	52 unit usaha	182 unit usaha	100	65 unit usaha	305 unit usaha	101,67
2	17	07	2.01	0004	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	0	0	150 unit usaha	157 unit usaha	104,7	150 unit usaha	307 unit usaha	100,00
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wira usaha	31,28% %	40,12 %	30,85%	47,35 %	153,5	153,5 %	31,06 %	31,06
2	17	08	2.01		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya pelatihan, pendataan, dan pembuatan video UMKM	400 unit usaha	335 unit usaha	150 unit usaha	318 unit usaha	212,0	100 unit usaha	753 unit usaha	188,25
						Terlaksananya pembuatan shelter untuk UMKM		1 paket	0	0		0	1 paket	100,00
2	17	08	2.01	0006	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	400 unit usaha	335 unit usaha	150 unit usaha	318 unit usaha	212,0	100 unit usaha	753 unit usaha	188,25

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian program/ kegiatan/ sub kegiatan semua sudah sesuai dengan target bahkan ada yang melebihi target dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (enM) Program/ Kegiatan yang melebihi target yang ditetapkan.

Realisasi Program/ Kegiatan berdasarkan target kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KRITERIA	KETERANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Memenuhi Target	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Memenuhi Target	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Memenuhi Target	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Memenuhi Target	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Memenuhi Target	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Memenuhi Target	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Memenuhi Target	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Melebihi Target	- Perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik - Adanya delegasi, koordinasi yang baik dari PPTK ke bendahara serta ke anggota tim - Peningkatan pemahaman pengurus dan pengawas dalam memahami peraturan sehingga kegiatan simpan pinjam yang dijalankan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Pengurus dan Pengawas Koperasi kooperatif dalam kerjasama dengan Tim Dinas Koperasi UKM Salatiga
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Melebihi Target	- Adanya peraturan pemeriksaan penilaian kesehatan koperasi wajib dilakukan minimal 1 tahun sekali - Peningkatkan pemahaman pengurus koperasi dalam memahami data isian kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi sehingga kertas kerja dapat diproses untuk dinilai - perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik - Adanya delegasi , koordinasi yang baik dari PPTK ke bendahara serta ke anggota tim - 'Pengurus dan Pengawas Koperasi kooperatif dalam kerjasama dengan Tim Dinas Koperasi UKM Salatiga
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Melebihi Target	Perencanaan yang matang, sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan anggaran kas
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Melebihi Target	Perencanaan yang matang, sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan anggaran kas
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Melebihi Target	Beberapa kegiatan telah dilakukan realisasi mendahului anggaran kasnya
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Melebihi Target	Banyaknya pelaku UMKM Kota Salatiga yang perlu mendapatkan pembinaan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UKM

Rencana Kerja Dinas Koperasi UKM disusun sebagai dokumen pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi UKM yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah. Mengacu UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, yaitu:

- c. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota;
- d. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
- e. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
- f. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
- g. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
- h. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota.
- i. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota.
- j. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
- k. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Dengan kewenangan tersebut di atas Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibentuk untuk memberdayakan dan mengembangkan koperasi dan UMKM agar tangguh menghadapi tantangan dan kondisi-kondisi sulit. Namun pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM seringkali terkendala persoalan yang cukup mendasar. Kendala tersebut berupa kelemahan internal dan eksternal. Kelemahan eksternal yang dimaksud terkait dengan usaha hulu-hilir. Yang dimaksud adalah hubungan antara satu pelaku dengan pelaku lain dalam jalur produksi (misalkan bahan baku) dan pemasaran.

Kelemahan internal UMKM antara lain kapasitas manajemen, kewirausahaan, teknis produksi, dan infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud meliputi antara lain akses terhadap sumber modal, pasar, teknologi informasi, sarana dan prasarana usaha.

Melihat peran Usaha Mikro Kecil Menengah dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, bahkan peningkatan pendapatan daerah yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dukungan terhadap pertumbuhan KUMKM perlu terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Untuk itu Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan usaha mikro agar menjadi kecil dan mengembangkan kemitraan antara usaha mikro dengan usaha menengah dan besar yang saling menguntungkan. Demikian pula pada koperasi.

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi UMK Kota Salatiga Tahun 2024 dan Perkiraan capaian 2025, secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut ini:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Salatiga

NO	INDIKATOR	SPM	IKK/ IKU	Target Renstra OPD (%)				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				Tahun (n-2) 2024	Tahun (n-1) 2025	Tahun (n) 2026	Tahun (n+1) 2027	Tahun (n-2) 2024	Tahun (n-1) 2025 (TW II)	Tahun (n) 2026	Tahun (n+1) 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya jumlah UKM		√	96	96	96	96	99,77	104,03	96,00	96,00	
2	Meningkatnya jumlah koperasi aktif		√	71,11	71,67	72,22	72,22	53,07	88,71	72,22	72,22	
3	Persentase koperasi yang berkualitas		√	52	53	54	54	73,68	95,34	54	54	
4	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan		√	30,70	35,09	39,47	39,47	52,63	38,99	39,47	39,47	
5	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan		√	37,59	38,85	40,10	40,10	83,70	47,57	40,10	40,10	
6	Persentase Akses pasar anggota koperasi		√	50	75	100	100	50,00	164,00	100	100	
7	Prosentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan		√	21	23	24	24	24,80	111,13	24	24	
8	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha		√	30,85	31,06	31,28	31,28	47,35	-	31,28	31,28	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		√	83,40	83,42	83,45	83,45	85,42	86,67	83,45	83,45	

n : tahun rencana (Tahun 2026)

Analisis kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, IKK maupun IKU sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Penjelasan serta analisis atas kesembilan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya jumlah UKM

$$\text{Persentase Usaha Mikro dan Kecil} = \frac{\text{Jumlah usaha mikro dan kecil}}{\text{Jumlah seluruh UKM}} \times 100$$

Persentase usaha mikro dan kecil pada tahun 2024 dapat dicapai sebesar 99,77% dari target sebesar 96%. Ini berarti, bila dibandingkan dengan target, pencapaian realisasi sebesar 103,93%. Terdapat usaha mikro sebanyak 26.541 unit usaha dari jumlah usaha mikro kecil dan menengah sebanyak 26.601 unit usaha. Upaya untuk mencapai target persentase usaha mikro dan kecil dilakukan melalui 2 (dua) program pendukung, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro
2. Program Pengembangan UMKM

Di dalam dua program di atas, telah dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi halal bagi UMKM dan badan hukum bagi kelompok UMKM;
- 2) Menyelenggarakan pameran dalam kota dan mengikuti berbagai macam pameran yang diselenggarakan baik di luar kota;
- 3) Penyediaan shelter bagi UMKM;
- 4) Berbagai macam pelatihan dan fasilitasi yaitu pelatihan boga, pelatihan packaging, pelatihan UMKM naik kelas, pelatihan digital marketing, pelatihan kewirausahaan, audiensi dengan UMKM, kurasi produk UMKM, link and match antara dunia pendidikan dengan pelaku usaha, dan pembuatan video UKM dalam rangka promosi produk UMKM;

b. Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif

$$\text{Persentase Koperasi aktif} = \frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100$$

Pada tahun 2024, target persentase koperasi aktif sebesar 71,11%. Realisasi dapat tercapai sebesar 53,07%. Ini berarti bila dibandingkan dengan target, pencapaian realisasi sebesar 74,63%. Terdapat 95 koperasi yang aktif, dari 179 koperasi yang berbadan hukum kota Salatiga. Penyebab koperasi

berstatus tidak aktif dikarenakan beberapa hal, diantaranya adanya permasalahan internal pengurus koperasi sendiri, permasalahan kredit macet, koperasi bermasalah hukum, koperasi tidak melaksanakan RAT, dan adanya koperasi yang menutup usaha.

Upaya untuk meningkatkan persentase koperasi aktif telah dilakukan melalui 4 (empat) program pendukung, yaitu:

- 1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- 3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Didalam keempat program di atas, telah dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan koperasi yang ada di Salatiga;
- 2) Berbagai macam bimtek dan pelatihan bagi SDM koperasi, diantaranya adalah bimtek penyusunan produk hukum koperasi, bimtek analisa kredit bagi KSP/USP, bimtek system informasi manajemen resiko, bimtek pemeriksaan kesehatan internal koperasi, pelatihan akuntansi koperasi, pelatihan penyusunan Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), pelatihan AMT, pelatihan pajak koperasi, digitalisasi koperasi, pelatihan manajemen koperasi, serta pelatihan usaha bagi anggota koperasi.
- 3) Diikutinya peringatan Hari Koperasi Tingkat Jawa Tengah, peringatan Hari Koperasi Tingkat Kota Salatiga, dan pameran yang diselenggarakan di PRPP Semarang.

c. Persentase Koperasi yang Berkualitas

Persentase Koperasi yang Berkualitas = $\frac{\text{Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}} \times 100$

Persentase koperasi yang meningkat kualitasnya target pada tahun 2024 sebesar 52% dan realisasi sebesar 73,68% sehingga capaiannya sebesar 141,69%. Kriteria koperasi yang aktif adalah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), meningkat aset, atau meningkat volume usahanya.

d. Persentase Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan

Persentase Koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan = $\frac{\text{Jumlah Koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan}}{\text{Jumlah koperasi aktif yang memiliki usaha simpan pinjam}} \times 100$

Target persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan pada tahun 2024 adalah 30,70% dan realisasinya sebesar 52,63% sehingga capaian sebesar 171,43%. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan melaksanakan penilaian/ pemeriksaan kesehatan koperasi, serta kurang lengkapnya data atau bahkan ketiadaan data yang disajikan oleh pengelola koperasi merupakan sebagian dari kendala yang dihadapi ketika melakukan penilaian/ pemeriksaan kesehatan koperasi.

e. Persentase Pengelola Koperasi yang Mengikuti Pelatihan

$$\frac{\text{Persentase koperasi yang pelatihan}}{\text{Pengelola yang mengikuti}} = \frac{\text{Jumlah yang dilatih}}{\text{Jumlah pengelola koperasi aktif}} \times 100$$

Target persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan pada tahun 2024 adalah sebesar 37,59% dan realisasi sebesar 83,70 sehingga capaian sebesar 222,67%. Banyaknya pelatihan yang diikuti pengelola koperasi dikarenakan Hal ini didorong oleh adanya anggaran yang tidak hanya bersumber dari APBD Kota Salatiga tetapi juga mendapatkan anggaran tambahan dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

f. Persentase Akses Pasar Anggota Koperasi

$$\frac{\text{Persentase akses pasar anggota koperasi}}{\text{Target tiap tahun (10 orang)}} = \frac{\text{Target akhir (40 tahun)}}{\text{Target akhir (40 tahun)}} \times 100$$

Target persentase akses pasar anggota koperasi pada tahun 2024 adalah sebesar 50% dan realisasi sebesar 50% sehingga capaian sebesar 100%.

g. Prosentase UMKM yang Mendapatkan Akses Pembiayaan

$$\frac{\text{Prosentase UMKM yang mendapatkan pembiayaan}}{\text{akses}} = \frac{\text{Jumlah UMKM yang mengakses permodalan}}{\text{Jumlah total UMKM}} \times 100$$

Target prosentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan pada tahun 2024 adalah sebesar 21% dan realisasi sebesar 24,80% sehingga capaian sebesar 118,10%. UMKM agar dapat mengakses pembiayaan harus memiliki kelayakan bisnis sehingga menjadi UMKM dibantu oleh Pemerintah untuk memiliki kelayakan bisnis dan mengakses pembiayaan.

h. Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha

$$\text{Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha} = \frac{\text{Jumlah UMKM yang mengakses permodalan}}{\text{Jumlah total UMKM}} \times 100$$

Target persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha pada tahun 2024 adalah sebesar 30,85% dan realisasi sebesar 47,35% sehingga capaian sebesar 153,48%.

i. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 adalah sebesar 83,40 dan realisasi sebesar 85,42% sehingga capaian sebesar 102,42%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang belum mencapai target adalah indikator meningkatnya jumlah koperasi aktif. Kriteria koperasi yang aktif adalah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), meningkat aset, atau meningkat volume usahanya. Banyaknya koperasi yang tidak aktif, disebabkan karena koperasi tidak melaksanakan aturan perkoperasian sepenuhnya, seperti tidak melaporkan perkembangan usahanya pada Dinas Koperasi UKM, terdapat permasalahan internal koperasi, kredit macet, dan koperasi menutup usahanya tanpa melaksanakan pembubaran koperasi.

Selain persentase koperasi yang aktif yang belum memenuhi target, berdasarkan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi tugas dari Dinas Koperasi UKM, diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- Faktor Internal :
 - a. Kurangnya SDM pendamping koperasi dan UMKM;
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelatihan koperasi dan UMKM pada guna mengikuti perkembangan teknologi;
 - c. Adanya program prioritas Pemerintah Pusat terhadap Koperasi Merah Putih.
- Faktor Eksternal
 - a. Kualitas pengurus dan pengawas koperasi yang belum memenuhi standar kompetensi
 - b. Sulitnya akses permodalan bagi koperasi, karena sulitnya memperoleh izin usaha simpan pinjam

- c. Perlunya diversifikasi usaha bagi koperasi untuk mengurangi risiko bisnis dan meningkatkan daya saing.
- d. Masih terbatasnya sarana prasarana kerja dan usaha serta teknologi koperasi dan UKM.
- e. Masih terbatasnya kemampuan UKM untuk meningkatkan dan memperluas pemasaran produknya, baik karena kemampuan manajerial, permodalan, maupun sarana dan prasarana.
- f. Jumlah data UMKM yang fluktuatif, sehingga sulit untuk mendapatkan data yang pasti.

Faktor penghambat dan pendorong penyelesaian permasalahan di atas adalah:

- a. Penghambat
 - 1. Pembinaan ke pengelola koperasi belum menyeluruh dan berkelanjutan;
 - 2. Kurangnya jangkauan pelaksanaan pelatihan di seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan;
 - 3. Ketidakseimbangan jumlah pertumbuhan usaha mikro dengan sumber daya yang ada.
- b. Pendorong
 - 1. Tingginya animo masyarakat untuk mendirikan koperasi;
 - 2. Semakin mudahnya persyaratan pendirian koperasi;
 - 3. Tingginya animo masyarakat untuk bekerja di sektor usaha mikro;
 - 4. Semakin terbukanya jaringan kerjasama antara masyarakat dan badan usaha swasta untuk pengembangan UKM.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah: “Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia”. Sedangkan dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, ditetapkan melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 yaitu:

- 1. Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan Pendidikan, keterampilan dan Kesehatan.
- 2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM.
- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur.
- 4. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan

tata ruang yang inklusif dan berkualitas melalui peningkatan kesadaran Masyarakat, pemanfaatan teknologi dan penegakan hukum.

5. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas.

Dari kelima Misi Wali Kota di atas, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM adalah misi ke-2 yaitu “Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM”.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah mempunyai dampak korelasi positif terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran Pemda dan Program Prioritas. Hubungan antara visi, misi bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.2 Dampak dari Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas

Permasalahan	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Dampak dari permasalahan dan isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas
- Internal a. Kurangnya SDM pendamping b. Kurangnya Sarpras pelatihan c. Koperasi Merah Putih - Eksternal a. Kualitas pengurus dan pengawas koperasi belum standart b. Sulitnya koperasi akses permodalan c. Perlunya diversifikasi usaha bagi koperasi d. Terbatasnya sarpras dan teknologi koperasi e. Keterbatasan kemampuan UKM f. Jumlah data UMKM yang fluktuatif	Visi : Terwujudnya Kota Salatiga sebagai kota BEDA (Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif) Misi : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM	Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia	Terwujudnya transformasi social dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berupaya agar capaian program Pemberdayaan UMKM, pengembangan UMKM dan pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi harus tercapai 100% bahkan lebih dari target karena berkorelasi positif terhadap capaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas 2. Melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi program, kegiatan, sub kegiatan yang baik 3. Komitmen dan Kerjasama yang baik oleh semua personil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah maupun komitmen dan kerjas sama denagn lintas sectoral dan pemangku kepentingan 4. Perlunya dukungan anggaran yang memadai 5. Perlunya Peningkatan kapasitas SDM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar dapat menyesuaikan tantangan dan dinamika pembangunan yang sangat dinamis.
				Program Pengembangan UMKM	
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	

Tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :

- a. Memfasilitasi perluasan pasar bagi UMKM baik lokal, nasional maupun mendunia;
- b. Memfasilitasi koperasi dan UMKM untuk mengakses pembiayaan;
- c. Fasilitasi regulasi dan bimbingan teknis untuk pelaku UMKM dan Koperasi;
- d. Data UMKM yang belum terintegrasi dan pendampingan UMKM yang dilakukan oleh beberapa OPD;
- e. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana;
- f. Koperasi Kelurahan Merah Putih yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo;
- g. Kualitas SDM pengawas dan pengelola Koperasi yang belum sesuai standart;
- h. Pendampingan UMKM agar bisa menjaga kualitas dan kontinuitas produk;
- i. Masih rendahnya pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produksi dan pemasaran UMKM;

Namun meski ada beberapa tantangan yang dihadapi, ada beberapa peluang yang bisa dioptimalkan oleh Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah, yaitu:

- a. Peningkatan dan pemberdayaan UMKM merupakan salah satu program prioritas Wali Kota;
- b. Kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk pemasaran dan penjualan produk UMKM;
- c. Beberapa produk UMKM Kota Salatiga bisa diterima pasar nasional bahkan ekspor seperti singkong keju;
- d. Letak strategis Salatiga antara Kab. Semarang dan Kab. Magelang, serta perlintasan Semarang- Solo dan terdapat 3 kampus besar yaitu UKSW, UIN Salatiga, dan STIE AMA.

Berdasarkan permasalahan, hambatan, dampak pencapaian visi misi Kepala Daerah, Tujuan, dan Sasaran Pemda, Program Prioritas, Tantangan dan Peluang, maka Isu strategis Kota Salatiga yang menjadi Isu Strategis Dinas Koperasi UKM adalah pada **“Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kerakyatan serta Masih Tingginya Angka Kesenjangan Pendapatan Penduduk”**.

Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah menjadi isu strategis Kota Salatiga dalam proses pembangunan perekonomian Kota Salatiga ke depan.

2.4 Review terhadap RKPD .

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, terdapat penyesuaian pada sub kegiatan yang dilaksanakan, target kinerja, dan jumlah anggaran.

Pada renstra 2025-2029, tahun 2026 Dinas Koperasi direncanakan akan melaksanakan 7 program, 12 kegiatan, dan 26 sub kegiatan. Untuk rencana kerja 2026, dilakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta besarnya anggaran, dengan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Hasil analisis kebutuhan pada tahun 2026 terdapat 7 program, 13 kegiatan, dan 31 sub kegiatan. Terdapat penambahan 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan pada analisis kebutuhan 2026, yaitu penambahan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Sedangkan penambahan sub kegiatan terdapat pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Review terhadap rancangan renstra pada tahun 2026 sebagaimana terlampir pada Tabel T-C.31.

Tabel T-C.31.
Review terhadap RKPD pada Tahun 2026 (rencana/n)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah											
	RKPD pada Tahun 2026 (rencana/n)					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026 Berdasarkan Renstra 2025-2029 (rencana/n)					Catatan Penting
No	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp000)	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Salatiga (Dinas Koperasi UKM)	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100	4.880.585	01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Salatiga (Dinas Koperasi UKM)	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100	4.880.585	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	85,73				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	85,73		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,05				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,05		
	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas	4	10.100,824	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas	4	10.100,824	
	0006. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	10.100,824	0006. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	10.100,824	
	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Dinas	100	3.335.764,023	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Dinas	100	3.335.764,023	
	0001. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	3.093.314,526	0001. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	3.093.314,526	
	0002.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	242.449,700	0002.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	242.449,700	
	2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100	46.000	2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100	46.000	

	0002. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	46.000	0002. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	46.000	
	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	323.936,35	2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100	323.936,35	
	0001. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	8.000	0001. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	8.000	
	0003. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	41.000	0003. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	41.000	
	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	41.000	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	41.000	
	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	30.000	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	30.000	
	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	4.560	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	4.560	
	0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	15.000	0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	15.000	
	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	184.376,35	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	184.376,35	
	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah	100	353.748,60	2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah	100	353.748,60	
	0005 Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22	196.952,900	0005 Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22	196.952,900	
	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	156.795,700	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	156.795,700	
	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	105.500	2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	55.500	
	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5.550	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	5.550	

	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	33.300	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	33.300	
	0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	16.650	0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	16.650	
	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	33	611.535	2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	33	611.535,00	
	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	166.500	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	166.500	
	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	12.210	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	12.210	
	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	27.000	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	27.000	
	0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	55.500	0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	55.500	
	0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	342.000	0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	342.000	

	0011 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	8.325	0011 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	8.325	
	03. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	71,79	180.000	03. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Salatiga (Dinas Koperasi UKM)	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	71,79	180.000	
	2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	50	180.000	2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	50	180.000	
	0004. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50	180.000	0004. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	50	180.000	
	04. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	74,43	83.200	04. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Salatiga (Dinas Koperasi UKM)	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	74,43	83.200	
	2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayahnya Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi	53	83.200	2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayahnya Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi	53	83.200	
	0001. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	53	83.200	0001. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	53	83.200	
	05. PROGRAM PENDIDIKAN DAN		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	52,58	300.000	05. PROGRAM PENDIDIKAN DAN	Salatiga (Dinas	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	52,58	300.000	

	LATIHAN PERKOPERASIAN					LATIHAN PERKOPERASIAN	Koperasi UKM)				
	2.01 Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100	300.000	2.01 Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100	300.000	
	0001. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100	300.000	0001. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100	300.000	
	06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi Aktif	62,18	916.000	06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Salatiga (Dinas Koperasi UKM)	Persentase Koperasi Aktif	62,18	916.000	
	2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	12	916.000	2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	12	916.000	
	0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Kabupaten/Kota	12	916.000	0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Kabupaten/Kota	12	916.000	
	07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	47,89	1.988.000	07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Salatiga (Dinas Koperasi UKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	47,89	1.988.000	

	2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		Jumlah unit usaha yang mendapatkan pemberdayaan usaha mikro melalui kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan	260	1.900.000	2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan		Jumlah unit usaha yang mendapatkan pemberdayaan usaha mikro melalui kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan	260	1.988.000	
	0003. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60	200.000	0003. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro		Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	60	200.000	
	0004. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200	1.700.000	0004. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200	1.788.000	
	08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase UMKM yang mengakses pembiayaan	25,55	1.527.231	08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Salatiga (Dinas Koperasi UKM)	Persentase UMKM yang mengakses pembiayaan	25,55	1.527.231	
	2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah unit usaha yang mendapatkan pengembangan usaha mikro	390	1.527.231	2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah unit usaha yang mendapatkan pengembangan usaha mikro	390	1.527.231	
	0006. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	390	1.527.231	0006. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	390	1.527.231	
	Total				9.731.016					9.731.016	

n : tahun rencana Tahun 2026)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1 Proses Usulan Program/ Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

Usulan program/ kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung, LSM, asosiasi-asosiasi. Usulan program diperoleh melalui musrenbang kelurahan, kecamatan, forum SKPD maupun pokok pikiran yang berasal dari anggota DPRD Kota Salatiga.

2.5.2 Kesesuaian Usulan Pemangku Kepentingan dengan program dan Kegiatan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Usulan dari para pemangku kepentingan ditampung dan diinventarisasi. Jika usulan tersebut sesuai dan selaras dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta anggaran mencukupi maka dimasukkan ke dalam program/ kegiatan/ sub kegiatan Dinas.

Penyelarasan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 tersaji dalam Tabel T-C.32.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Salatiga

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	Kalibening, Tingkir Lor	Terselenggaranya Gebyar seni dan Bazar UMKM	Rp. 120.000.000,- 2 kali kegiatan	Pokir Hj. Riawan Woro E, SE, MM
2	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kab/ Kota	Kalibening, Tingkir Lor	Terselenggaranya Gebyar seni dan Bazar UMKM	Rp. 120.000.000,- 2 kali kegiatan	Pokir Hj. Riawan Woro E, SE, MM
3	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen, standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	RW 1 Ringinawe Ledok; RW 10 Perum Argomulyo	Terselenggaranya Bazar UMKM	Rp. 120.000.000,- 2 kali kegiatan	Pokir Bp. Agus Warsito
4		Gedung Korpri	Terselenggaranya Pelatihan dan Bazar UMKM	Rp. 150.000.000,- 1 kali kegiatan	Pokir Bp. Bagas Aryanto, SP
5		Ngemplak RW 02 Dukuh; Grogol Baru RW 08; Gamol RW 06	Terselenggaranya Gebyar UMKM Salatiga	Rp. 106.000.000,- 3 kali kegiatan	Pokir Bp. Heru Prastyo, SE., ME
6	Program Pengembangan UMKM	Dinkop UKM	Terselenggaranya Pelatihan kewirausahaan dan kunjungan pelatihan untuk 50 UMKM	Rp. 100.000.000,- 1 kali kegiatan	Pokir Bp. Heru Prastyo, SE., ME
7	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinkop UKM	Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan UMKM dan Sertifikasi Kompetensi 45 UMKM	Rp. 171.075.000,- 1 kali kegiatan	Pokir Bp. Latif Nahari, ST
8	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinkop UKM	Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan Usaha untuk 30 UMKM	Rp. 50.000.000,- 1 kali kegiatan	Pokir Bp. Antonius Doohan Kuswirasetiawan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KOPERASI UKM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pusat dan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2025-2045 memiliki visi: “Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”

Visi tersebut diwujudkan melalui 17 arah (tujuan), 8 misi (agenda), dan 45 Indikator Utama Pembangunan. Delapan misi (agenda) pembangunan terdiri dari tiga misi transformasi, dua landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi transformasi. Misi pembangunan nasional Tahun 2025-2045 yaitu:

1. Transformasi Indonesia
 - 1) Transformasi Sosial
 - 2) Transformasi Tata Kelola
 - 3) Transformasi Ekonomi
2. Landasan Transformasi
 - 1) Supermasi Hukum Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
 - 2) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
3. Kerangka Implementasi Transformasi
 - 1) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
 - 2) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
 - 3) Kestinambungan Pembangunan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkaitan dengan misi Transformasi Ekonomi. Untuk merealisasikan upaya pencapaian tujuan negara dilakukanlah pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dituangkan dalam beberapa undang-undang antara lain:

- a. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang diarahkan untuk membangun koperasi yang kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan serta

untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

- b. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir kali Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

- c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);

Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- d. Koperasi Kelurahan Merah Putih

Presiden RI telah menetapkan kebijakan pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih.

Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, memberikan pelayanan secara sistematis dan cepat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi, modernisasi manajemen sistem perkoperasian, menekan harga ditingkat konsumen, meningkatkan harga ditingkat petani, menekan pergerakan tengkulak, memperpendek rantai pasok, meningkatkan inklusi keuangan, menjadi akselerator, konsolidator, dan agregator UMKM, serta menekan tingkat kemiskinan ekstrem, mendukung program pengendalian inflasi daerah.

Pemberdayaan UMKM merupakan bagian yang integral dalam pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Amanat UUD 1945 dan dua Undang-Undang tersebut mengarahkan pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk dilaksanakan melalui pendekatan keberpihakan (affirmative) dan pendekatan pengembangan kemandirian. Pendekatan keberpihakan diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan

berusaha, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan, serta perlindungan usaha terutama bagi koperasi dan UMKM yang berkembang di antara masyarakat berpendapatan rendah. Pada saat yang sama, pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan untuk membangun kemandirian dan daya saing melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penerapan iptek, dan penguatan skala ekonomi sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menghadapi kondisi pasar yang dinamis. Pemberdayaan koperasi dan UMKM juga diarahkan untuk memperkuat dan meningkatkan kontribusinya dalam perekonomian, baik dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun peningkatan nilai tambah perekonomian yang menyokong pertumbuhan ekonomi tinggi dan pembangunan berkelanjutan.

3.1.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 menyebutkan tujuan pembangunan Koperasi dan UKM adalah :

4. “Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB”

Tujuan tersebut sejalan dengan isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat Koperasi dan UKM di Jawa Tengah dalam menghadapi tantangan dan hambatan melalui momentum yang ada serta kekuatan yang dimiliki Koperasi dan UKM Jawa Tengah

5. “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis”

Tujuan tersebut sebagai penunjang kesekretariatan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui tata kelola perangkat daerah yang berintegritas dan dinamis.

Sedangkan sasaran pembangunan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB;

Sasaran ini sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan maksud untuk mengukur peningkatan Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah.

2. Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi

Sasaran ini sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan maksud untuk mengukur Peningkatan UKM Non Pertanian pada Level Provinsi

3. Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Jawa Tengah

Sasaran ini sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan maksud untuk mengukur Jumlah Wirausaha di Jawa tengah melalui Peningkatan Rasio Kewirausahaan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, UKM merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi UKM tahun 2025 yang selaras dengan RPJMD 2025-2029 dan Renstra Dinas Koperasi UKM Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Tujuan:

Tujuan Dinas Koperasi UKM berkaitan dengan tugas dan fungsinya adalah Meningkatkan Kualitas Koperasi dan Daya Saing UMKM Guna Menunjang Perekonomian.

Indikator Tujuan adalah

1. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
2. Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Kecil yang Mengikuti Pameran

b. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi UKM adalah

1. Meningkatnya Koperasi yang Sehat dan Cukup Sehat

Indikator : Persentase Koperasi yang Sehat dan Cukup Sehat

2. Meningkatnya Kualitas dan Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil,

Indikator : Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Koperasi, UKM Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				Realisasi 2024	Target Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
Meningkatkan kualitas koperasi dan daya saing UMKM guna menunjang perekonomian		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	0,18	0,25	0,35	0,50	0,65	0,75	1,00	1,00
		Pertumbuhan omset usaha mikro kecil yang mengikuti pameran	%	11	13	15	17	19	20	22	22
	Meningkatnya koperasi yang sehat dan cukup sehat	Persentase koperasi yang sehat dan cukup sehat	persen	64	65,38	67,92	68,52	69,09	69,64	70,18	70,18
	Meningkatnya kualitas dan perkembangan usaha mikro dan kecil.	Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina	persen	45,3%	49,8%	50,8%	51,7%	52,6%	53,6%	54,5%	54,5%

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinkop Koperasi dan UKM Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas koperasi dan daya saing UMKM guna menunjang perekonomian	Meningkatnya koperasi yang sehat dan cukup sehat	Menyelenggarakan pelatihan perkoperasian bagi pengurus, pengawas dan anggota koperasi	Penguatan kapasitas dan ketrampilan lembaga Koperasi terutama untuk mendorong peningkatan koperasi yang berkualitas
		Melakukan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi	
		Mengadakan pelatihan manajerial dan digitalisasi bagi pengelola koperasi	
		Menyelenggarakan dan mengikuti pameran	
	Meningkatnya kualitas dan perkembangan usaha mikro dan kecil.	Menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha, keuangan, digital marketing, desain kemasan, standar mutu, dan inovasi produk serta penguatan jiwa wirausaha (entrepreneurship)	Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM
		Mendorong integrasi e-commerce, fasilitasi UMK dalam pameran, expo, dan promosi produk unggulan daerah, dan kemitraan dengan ritel modern dan usaha besar;	
		Menyediakan fasilitas sertifikasi produk agar sesuai dengan standar nasional	

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Dinas Koperasi UKM) merupakan perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah).

3.3.1.1 Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah: **“Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia”**. Sedangkan Misi Wali Kota yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM yaitu pada misi ke-2, “Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM”

Dalam pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, disusun Program Unggulan Wali Kota yang tercantum di dalam RPJMD. Program unggulan tersebut didukung oleh program perangkat daerah sesuai dengan nomenklturnya.

Terdapat tiga program yang merupakan program pendukung program unggulan Wali Kota, yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Program Pengembangan UMKM dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

Rincian program yang mendukung Program Unggulan Wali Kota seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Perangkat Daerah	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
2	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktivitas koperasi	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Selain itu, prioritas pembangunan daerah yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Kota Salatiga selama tahun 2025-2029 yang disinkronkan dengan program nomenklatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD, Program Unggulan Walikota, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas Dinas Koperasi UKM

No	Arah Kebijakan RPJMD	Program Unggulan Wali Kota	Program Prioritas Perangkat Daerah	Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah
1	Perluasan dalam fasilitasi modal usaha untuk UKM, penguatan keterampilan dan jejaring pelaku usaha serta pengembangan akses pasar UKM dengan berbagai platform	PROGRAM SEKAR (Salatiga Berkarya) Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan lokal melalui pendampingan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
					Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
			Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
2	Pemberdayaan dan mendukung perluasan akses koperasi terhadap pembiayaan dan pasar lokal, serta memberikan insentif bagi koperasi yang berinovasi dan berdaya saing	PROGRAM SEKAR (Salatiga Berkarya)	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

3.3.1.2 Dukungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Terhadap RPJMN 2025-2029 dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 terdapat 8 Prioritas Nasional yang terdiri dari 83 Kegiatan Prioritas Utama yang merupakan langkah konkret pencapaian sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Dalam Asta Cita, terdapat 8 Program Hasil terbaik Cepat (PHTC) yang perlu didukung oleh Pemerintah Daerah. Adapun dukungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap PHTC RPJMN 2025-2029 ditunjukkan melalui tabel berikut.

Tabel 3.5 Dukungan Terhadap 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN 2025-2029

No	PHTC	Program Jawa Tengah	Program Salatiga
1	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilennial untuk membuka lawangan kerja	Program Sekar (Salatiga Berkarya) Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan melalui pendampingan UMKM

Dukungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atas kebijakan pengembangan wilayah nasional dan proyek strategis nasional di wilayah Kedungsepur tidak ada karena Kedungsepur diprioritaskan untuk pengembangan kawasan Perkotaan Salatiga (tematik kota pendidikan).

3.3.1.2 Dukungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Dukungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Dukungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah terhadap Program Prioritas Provinsi Jawa tengah

No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah		Dukungan Program Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Salatiga	
	Program	Intervensi Kota Salatiga	Program Nomenklatur	Rencana Aktivitas
1	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI dan P-IRT secara gratis	Pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM
2	Penguatan dan Pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Penguatan koperasi desa	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pelatihan bagi pengurus dan pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP)
				Inkubator koperasi bagi KKMP
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Promosi produk Koperasi Kelurahan Merah Putih melalui pameran dan bazaar

3.3.1.3 Pencapaian SDGs

Berkaitan dengan pencapaian SDGs yang merupakan singkatan dari Sustainable Development Goals yaitu pembangunan berkelanjutan untuk mencapai masa depan yang lebih baik, Dinas Koperasi UKM berkontribusi utamanya dalam tujuan pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Program dan kegiatan yang terutama mendukung pencapaian SDGs adalah:

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

2. Program Pengembangan UKM.

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

3.3.1.4 Pencapaian NSPK

NSPK yang berkaitan dengan pelayanan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan PermenkopUKM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma Standar dan Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi

**Tabel 3.7 Keterkaitan antara NSPK dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
NSPK: PermenkopUKM No 14 Tahun 2023 tentang Norma Standar dan Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi	Meningkatkan kualitas koperasi dan daya saing UMKM guna menunjang perekonomian	Meningkatnya koperasi yang sehat dan cukup sehat			Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		
					Pertumbuhan omset usaha mikro kecil yang mengikuti pameran		
					Persentase koperasi yang sehat dan cukup sehat		
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Prosentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Keg Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	Sub keg Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi		Persentase Koperasi yang Berkualitas	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KAB/ KOTA	
				Meningkatnya Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi	Keg Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
				Koperasi		Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi	Sub keg Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Meningkatnya SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Keg Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Meningkatnya Unit Usaha yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Keg Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub keg Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
		Meningkatnya kualitas dan			Persentase usaha mikro dan kecil yang dibina		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
		perkembangan usaha mikro dan kecil	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya unit usaha yang mendapatkan pemberdayaan usaha mikro melalui kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan		Jumlah unit usaha yang mendapatkan pemberdayaan usaha mikro melalui kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan	Keg Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Sub keg Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Sub Keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			Meningkatnya daya saing UMKM		Persentase UMKM yang mengakses pembiayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
					Jumlah unit usaha yang mendapatkan pengembangan usaha mikro	Keg Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	

3.3.2 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut di atas dan upaya pendayagunaan potensi ekonomi daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maka program, kegiatan, dan sub kegiatan secara keseluruhan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 Total program yang akan dilaksanakan sebanyak 7 program, 13 kegiatan, dan 30 sub kegiatan dengan lokasi kegiatan berada di Kota Salatiga, yaitu

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah:
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKP
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota

C. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI;

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayahnya Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN:

1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

E. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha.

F. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan

- Sub Kegiatan Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro.
- Sub Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro.

G. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

- Sub Kegiatan produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia serta desain dan teknologi.

Secara total, pada renja 2026 ini, untuk kebutuhan program, kegiatan, sub kegiatan, diperlukan anggaran sebesar Rp9.731.016.000,-. Sumber dana yang diharapkan berasal dari APBD Kota Salatiga dan DBHCHT yang terbagi sebagai berikut:

1.	Program	Penunjang	Urusan	Rp	4.880.585.000	
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
2.	Program	Pengawasan	dan	Rp	180.000.000	
	Pemeriksaan Koperasi					
3.	Program	Penilaian	Kesehatan	Rp	83.200.000	
	KSP/USP Koperasi					
4.	Program	Pendidikan	dan	Latihan	Rp	300.000.000
	Perkoperasian					
5.	Program	Pemberdayaan	dan	Rp	916.000.000	
	Perlindungan Koperasi					

6.	Program Pemberdayaan UMKM	Rp	1.988.000.000
7.	Program Pengembangan UMKM	Rp	1.527.231.000

Tidak ada perbedaan antara rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dan pagu indikatif antara RKPD dengan Renja sebesar Rp9.731.016.000,- Rincian pagu, program, kegiatan beserta sub kegiatan sebagaimana terlampir pada Tabel T-C.33.

Tabel TC. 33																
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun (rencana/n) 2026 dan Prakiraan Maju Tahun (n+1) 2027																
Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun (n) 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (n+1) 2027				
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Ribu)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Ribu)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	
2	17	01			01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	Dinas Koperasi UKM	100	%	4.880.585	APBD		100	%	4.836.500.000	
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			85,73					86,1		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah			69,05					69,2		
2	17	01	2.01		2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas		4	dokumen	10.100,824	APBD		4	dokumen	51.000.000	
2	17	01	2.01	0006	0006. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan		4	dokumen	10.100,824	APBD		4	dokumen	11.000	
					Sub Keg Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								1	dokumen	10.000.000	
					Sub Keg Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah								1	dokumen	10.000.000	
					Sub Keg Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								1	dokumen	20.000.000	

2	17	01	2.02		2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Dinas		100	Persen	3.095.739,023	APBD		100	Persen	3.283.317.168
2	17	01	2.02	0001	0001. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25	orang	3.093.314,526	APBD		25	orang	3.133.317.168
2	17	01	2.02	0002	0002. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	dokumen	242.449,700	APBD		2	dokumen	150.000.000
2	17	01	2.03		2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah		100	Persen	46.000	APBD		100	Persen	46.000
2	17	01	2.03	0002	0002. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		2	dokumen	46.000	APBD		2	dokumen	46.000
2	17	01	2.06		2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		100	Persen	323.936,35	APBD		100	Persen	319.000.000
2	17	01	2.06	0001	0001. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	paket	8.000	APBD		1	paket	9.000
2	17	01	2.06	0002	0002. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
2	17	01	2.06	0003	0003. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	paket	41.000	APBD		1	paket	26.000
2	17	01	2.06	0004	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	paket	41.000	APBD		2	paket	41.000
2	17	01	2.06	0005	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	paket	30.000	APBD		1	paket	30.000
2	17	01	2.06	0006	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		1	dokumen	4.560	APBD		1	dokumen	3.000
2	17	01	2.06	0008	0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1	laporan	15.000	APBD		1	laporan	15.000

2	17	01	2.06	0009	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	laporan	184.376,35	APBD		1	laporan	175.000
					Sub Keg Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							1	dokumen	20.000
2	17	01	2.07		2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah		100	Persen	353.748,60	APBD		100	Persen	25.000
2	17	01	2.07	0005	0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		22	paket	196.952,900	APBD		1	paket	0
2	17	01	2.07	0006	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		12	unit	156.795,700	APBD		10	unit	25.000
2	17	01	2.08		2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100	Persen	199.500,000	APBD		100	Persen	98.800
2	17	01	2.08	0001	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	laporan	5.550	APBD		1	laporan	3.000
2	17	01	2.08	0002	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	laporan	33.300	APBD		1	laporan	25.000
2	17	01	2.08	0003	0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	laporan	16.650	APBD		1	laporan	20.000
2	17	01	2.08	04	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					APBD		1	laporan	50.000
2	17	01	2.09		2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100	Persen	611.535,00	APBD		100	Persen	291.000
2	17	01	2.09	0001	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4	unit	166.500	APBD		4	unit	150.000
2	17	01	2.09	0002	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1	unit	12.210	APBD		1	unit	13.000

2	17	01	2.09	0006	0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25	unit	27.000	APBD		25	unit	28.000
2	17	01	2.09	0009	0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	unit	55.500	APBD		1	unit	50.000
2	17	01	2.09	10	0010 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	unit	342.000	APBD		1	unit	50.000
2	17	01	2.09	11	0011 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	unit	8.325	APBD				
2	17	03			03. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		71,79	%	180.000	APBD		71,79	%	135.000
2	17	03	2.01		2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi		50	koperasi	180.000	APBD		50	koperasi	135.000
2	17	03	2.01	0004	0004. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota		50	koperasi	180.000	APBD		50	koperasi	135.000
2	17	04			04. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas		74,43	%	83.200	APBD		43,86	%	135.000

2	17	04	2.01		2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayahnya Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Koperasi		53	koperasi	83.200	APBD		50	koperasi	135.000
2	17	04	2.01	0001	0001. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		53	koperasi	83.200	APBD		50	koperasi	135.000
2	17	05			05. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan		52,58	%	300.000	APBD		53,06	%	310.000
2	17	05	2.01		2.01 Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		100	orang	300.000	APBD		100	orang	310.000
2	17	05	2.01	0001	0001. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi.	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		100	orang	300.000	APBD		100	orang	310.000
2	17	06			06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif		62,18	%	916.000	APBD		62,42	%	310.000
2	17	06	2.01		2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi		12	unit usaha	916.000	APBD		12	unit usaha	310.000.000

2	17	06	2.01	01	0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		12	unit usaha	916.000	APBD		12	unit usaha	310.000.000
2	17	07			07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha		47,89	%	1.988.000	APBD		48,64	%	1.597.500
2	17	07	2.01		2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah unit usaha yang mendapatkan pemberdayaan usaha mikro melalui kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan		260	unit usaha	1.988.000	APBD		310	unit usaha	1.597.500
2	17	07	2.01	0004	0003. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		60	unit usaha	200.000	APBD		60	unit usaha	200.000
2	17	08			0004. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		200	unit usaha	1.788.000	APBD		250	unit usaha	1.397.500
2	17	08	2.01		08. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang mengakses pembiayaan		25,55	%	1.527.231	APBD		25,93	%	1.500.000
2	17	08	2.01	0006	2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah unit usaha yang mendapatkan pengembangan usaha mikro		390	unit usaha	1.527.231	APBD		390	unit usaha	1.500.000
					0006. Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		390	unit usaha	1.527.231	APBD		390	unit usaha	1.500.000
										9.731.016					8.824.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

4.1 Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disusun dalam rangka mencapai target kinerja Rencana Strategis yang akan dilaksanakan dari tahun 2025 hingga 2029. Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dilaksanakan melalui 7 program, yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota dengan sasaran meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah, ditandai dengan 3 indikator pada tahun 2026 dengan target persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan sebesar 100%, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah sebesar 69,05, dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 85,73.

2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi, ditandai dengan 1 indikator yaitu prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan target tahun 2026 sebesar 71,79%

3) Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi

Program Penilaian Kesehatan Ksp/ Usp Koperasi dengan sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi, ditandai dengan 1 indikator yaitu meningkatnya koperasi yang berkualitas dengan target tahun 2026 sebesar 72,16%

4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan sasaran meningkatnya kualitas SDM perkoperasian, ditandai dengan 1 indikator yaitu persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan dengan target tahun 2026 sebesar 52,58%

5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan sasaran meningkatnya produktivitas koperasi, ditandai dengan 1 indikator yaitu persentase koperasi aktif dengan target di tahun 2026 sebesar 62,18%

6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dengan sasaran meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri, ditandai

dengan 1 indikator, yaitu prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha dengan target tahun 2026 sebesar 47,89%

7) Program Pengembangan UMKM

Program Pengembangan UMKM dengan sasaran meningkatnya daya saing UMKM, ditandai dengan 1 indikator, yaitu prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan dengan target pada tahun 2026 sebesar 25,55%.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						9.731.016.00 0,00							9.685.106.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.731.016.00 0,00							9.685.106.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						9.731.016.00 0,00							9.685.106.000,00	
1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan Nilai SAKIP Indeks Kepua san Masyar akat (IKM) Perang kat	-			100 persen 100 skor 85,73 Nilai	4.736.585.00 0,00						-	5.304.650.000,00	

			<i>Daerah</i>													
		[Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100 69.65 87.2	100 68.90 85.42	100 68.95 83.42	100 69.05 85.73	4.736.585.000,00	-	-	-	-	-	-	5.304.650.000,00	-

	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas	-			4 Dokumen	10.100.824,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodalan, penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk	Dinas Koperasi UKM	-	11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
--	--------------	--	--	---	--	--	-----------	---------------	--	--	--	---	--------------------	---	---------------	---

N O	K O D E	URUSAN / BIDANG URUSA N / PROGR AM / OUTCO ME / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	INDIKAT OR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARG ET 202 6	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	13	14	1 5	16	1 7
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	10.100.82 4,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutk a n pengemb angan infrastrukt ur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualita s, mendoro ng kewirus ah aan, menge mbangka n industri kreatif serta mengem ba ngkan	Penguata n Landasan Tata Kelola Pemerint ah an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguata n kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama	Dinas Koperasi UKM		11.000.00 0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

											agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	ke mampuan dalam mengaks es permodal an , penguasa an teknologi digital dan meningkat kan produkti vitas, kualitas dan pemasar an produk					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

	K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKAT OR PROGRA M / KEGIAT AN / SUB KEGIATA N	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARG ET 202 6	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02	Administ rasi Keuanga n Perangk at Daerah	Prosentase Pelaksanaa n Administras i Keuangan Dinas	-			100 persen	3.335.764.226,00			Melanjutk a n pengemb angan infrastruk tur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualit as, mendoro ng kewiraus ah aan, menge mbangka n industri kreatif serta mengem ba ngkan agromarit im industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguat an Landasa n Tata Kelola Pemerint ah an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguata n kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampua n dalam mengaks es permodal an , penguas a an teknologi digital dan meningk atk an produkti	Dinas Koperasi UKM	-	4.050.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

												vitasi, kualitas dan pemasar an produk				
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRANSKOR	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	3.093.314.526,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama kemampuan dalam mengakses permodalan, penguasaan teknologi digital	Dinas Koperasi UKM		3.800.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

												dan meningk atk an produkti vitas, kualitas dan pemasar an produk				
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

N O	K O D E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGR AM / OUTCO ME / KEGIAT AN / SUB KEGIAT AN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIOD E RENST RA OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARG ET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyedia an Administ rasi Pelaksa naan Tugas ASN				12 Dokumen	242.449.700, 00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutk a n pengemb angan infrastrukt ur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualita s, mendoro ng kewiraus ah aan, menge mbangka n industri kreatif serta mengem ba ngkan agromarit im industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguata n Landasa n Tata Kelola Pemerint ah an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguata n kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampua n dalam mengaks es permodal an , penguas a an teknologi digital	Dinas Koperasi UKM	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	

												dan meningk atk an produkti vitas, kualitas dan pemasar an produk				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	2.17.01.2.03	Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Prosentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah</i>	-			100 persen	46.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta membangun agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama kemampuan dalam mengakses permodalan, penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk	Dinas Koperasi UKM	-	45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
--	--------------	---	--	---	--	--	------------	---------------	--	--	--	--	--------------------	---	---------------	---

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	13	14	1 5	16	1 7
	2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamana n Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	46.000.000,0 0	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas , mendoron g kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodala n , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasara n produk	Dinas Koperasi UKM		45.000.000,0 0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATO R PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	13	14	1 5	1 6	1 7
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	-			100 persen	323.936.350,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke kemampuan dalam mengakses pemodalannya, penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk	Dinas Koperasi UKM	-	400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodala n , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasara n produk	Dinas Koperasi UKM	9.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
		-	-	-	-	-	-	4.736.585.000,00	-	-	-	-	-	-	5.304.650.000,00	-
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas , mendoron g kewirause h aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemb a ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguata n Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakse s permodala n , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasara n produk	Dinas Koperasi UKM		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		[Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraa n urusan perangkat daerah]	Indeks Kepuasa n Masyarak at (IKM) Perangka t Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung	100 69.65 87.2	100 68.90 85.42	100 68.95 83.42	100 69.05 85.73	4.736.585.000,0 0	-	-	-	-	-	5.304.650.000,00	-	

			urusan pemerintahan													
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	13	14	1 5	16	1 7
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	41.000.000,0 0	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodala n , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasara n produk	Dinas Koperasi UKM	45.000.000,0 0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	13	14	1 5	16	1 7
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	41.000.000,0 0	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodala n , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasara n produk	Dinas Koperasi UKM		45.000.000,0 0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N/ SUB KEGIATA N	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	30.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutk an pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas , mendoron g kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodala n , penguasa an teknologi digital dan meningkat kan produkti vitas, kualitas dan pemasara n produk	Dinas Koperasi UKM		33.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS / CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	13	14	1 5	16	1 7
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.560.000,0 0	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas , mendoron g kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodala n , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasara n produk	Dinas Koperasi UKM		5.500.000,0 0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	13	14	1 5	16	1 7
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	15.000.000,0 0	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodala n , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasara n produk	Dinas Koperasi UKM		17.000.000,0 0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	13	14	1 5	1 6	1 7
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	184.376.350,0 0	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt ur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodala n , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasara n produk	Dinas Koperasi UKM	220.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	

	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Prosentase pengadaan barang milik daerah</i>	-			100 persen	353.748.600,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodalan, penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk	Dinas Koperasi UKM	-	170.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
--	--------------	--	---	---	--	--	------------	----------------	--	--	--	---	-----------------------	---	----------------	--

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPO K SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA L					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	13	14	1 5	1 6	1 7
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				120 Unit	196.952.900,0 0	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas , mendoron g kewirausa h aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemb a ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakse s permodala n , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasara n produk	Dinas Koperasi UKM		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOME / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	156.795.700,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodalan , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasaran produk	Dinas Koperasi UKM		70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			100 persen	55.500.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengemba ngkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodalan , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasaran produk	Dinas Koperasi UKM	-	201.150.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
--	--------------	--	--	---	--	--	------------	---------------	--	--	---	---	--------------------	---	----------------	---

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS / CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	13	14	1 5	16	1 7
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.550.000,0 0	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas , mendoron g kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses pemodala n , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasara n produk	Dinas Koperasi UKM		6.000.000,0 0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOME / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	33.300.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodalan , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasaran produk	Dinas Koperasi UKM		33.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	13	14	1 5	16	1 7
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	16.650.000,0 0	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodala n , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasara n produk	Dinas Koperasi UKM		16.650.000,0 0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	13	14	1 5	1 6	1 7
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses pemodala n , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasara n produk	Dinas Koperasi UKM		145.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	-			100 persen	611.535.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses pemodalannya, penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk	Dinas Koperasi UKM	-	427.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
--	--------------	---	---	---	--	--	------------	----------------	--	--	--	---	--------------------	---	----------------	---

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPO K SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONA L					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	166.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas , mendoron g kewirausa h aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemb a ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakse s permodala n , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasara n produk	Dinas Koperasi UKM		166.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	13	14	1 5	16	1 7
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a				1 Unit	12.210.000,0 0	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodala n , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasara n produk	Dinas Koperasi UKM		13.000.000,0 0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

N O	KOD E	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISAS I CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	13	14	1 5	16	1 7
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	27.000.000,0 0	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodala n , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasara n produk	Dinas Koperasi UKM		30.000.000,0 0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOM E / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	55.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama kemampuan dalam mengakses permodalan, penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk	Dinas Koperasi UKM		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	342.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodalan , penguasa an teknologi digital dan meningkatk an produkti vitas, kualitas dan pemasaran produk	Dinas Koperasi UKM		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8.325.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA.ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas , mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodalan , penguasa an teknologi digital dan meningkatk an produkti vitas, kualitas dan pemasaran produk	Dinas Koperasi UKM	8.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas	-			54 persen	180.000.000,00						-	135.000.000,00	
		[Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi]	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	78.75	62.50	65.00	71.79	180.000.000,00	-	-	-	-	-	-	135.000.000,00	-

N O	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOME / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONA L	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	12	13	14	1 5	1 6	1 7
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Telaksananya Bimtek Penyusunan Produk Hukum Internal Koperasi Tahap Lanjutan Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perkoperasian Terlaksananya Bimtek Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan Bagi Koperasi Terlaksananya Bimtek Peningkatan Kompetensi Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi Terlaksananya Bimtek Sistem Pengawasan Koperasi Terlaksananya Rakor Dana Bergulir Terlaksananya Sosialisasi Perkoperasian Bagi Masyarakat Terlaksananya Uji Kompetensi Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi	-			30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 4 Kali 30 Orang 30 Orang	180.000.000,00			Melanjutk a n pengemb angan infrastrukt ur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualita s, mendoron g kewirausa h aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemb a ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguata n Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakse s pemodala n , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasara n produk	Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi se- Kota Salatiga	-	135.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				50 Unit Usaha	180.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola PemerintahanBerintegritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodalan , penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk	Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi se-Kota Salatiga		135.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	-			39,47 persen	83.200.000,00						-	135.000.000,00	
		[Meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi]	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	87.08	71.58	71.78	74.43	83.200.000,00	-	-	-	-	-	-	135.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimtek Implementasi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Koperasi Terlaksananya Bimtek Kualitas Penerapan Manajemen Strategik Bagi Koperasi Terlaksananya Bimtek Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Terlaksananya Rakor Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Terlaksananya Workshop Auditing Koperasi	-			30 Orang 25 Orang 50 Orang 20 Kali 30 Orang	83.200.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewrausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah anBerintegritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodalan , penguasa an teknologi digital dan meningkatk an produkti vitas, kualitas dan pemasaran produk	Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi se-Kota Salatiga	-	135.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				50 Unit Usaha	83.200.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirusah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodalan , penguasa an teknologi digital dan meningkatk an produkti vitas, kualitas dan pemasaran produk	Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi se-Kota Salatiga		135.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
4.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	-			52,58 persen	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian]	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	54.46	57.89	52.00	52.58	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian Terlaksananya Inkubator Koperasi Terlaksananya Musrenbang Gerakan Koperasi Kota Salatiga Terlaksananya Pelatihan Akuntansi dan Perpajakan Koperasi Terlaksananya Pelatihan Balances Scorecard Terlaksananya Pelatihan E Commerce Bagi Koperasi Terlaksananya Pelatihan Perbaikan Tata Kelola Koperasi Sesuai Permenkop Terbaru	-			210 Orang 20 Orang 90 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang	300.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke kemampuan dalam mengakses permodalan , penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk	PENGURUS, PENGAWAS, DAN PENGELOLA KOPERASI SE KOTA SALATIGA	-	300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

NO	KO DE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPO K SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahua n Perkoperasia n				210 Orang	300.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastrukt r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas , mendoron g kewirausa h aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemb a ngkan agromariti m industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguata n Landasan Tata Kelola Pemerinta h an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakse s permodala n , penguasa an teknologi digital dan meningkat k an produkti vitas, kualitas dan pemasara n produk	PENGURUS , PENGAWA S, DAN PENGELOL A KOPERASI SE KOTA SALATIGA		300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
5	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAA NDAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	-			62,18 persen	916.000.000,00						-	305.000.000,00	
		[Meningkatkan produktivitas koperasi]	Persentase Koperasi Aktif	63.13	53.98	55.00	62.18	916.000.000,00	-	-	-	-	-	-	305.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pameran Produk Koperasi Terlaksananya Pembentukan Badan Hukum Koperasi	-			20 Unit Usaha 1 Koperasi	916.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodalan , penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk	KOPERASI DAN USAHA KECIL	-	305.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				20 Unit Usaha	916.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodalan , penguasa an teknologi digital dan meningkatk an produkti vitas, kualitas dan pemasaran produk	KOPERASI DAN USAHA KECIL		305.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
6.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	-			47,89 persen	1.988.000.000,00						-	2.230.000.000,00	
		[Meningkatkan kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	Prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	49.96	40.88	45.00	47.89	1.988.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.230.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah unit usaha yang mendapatkan pemberdayaan usaha mikro melalui kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan	-			150 unit usaha	1.988.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama kemampuan dalam mengakses permodalan, penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk	UMKM Kota Salatiga	-	2.230.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				50 Unit Usaha	200.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodalan , penguasa an teknologi digital dan meningkatk an produkti vitas, kualitas dan pemasaran produk	UMKM Kota Salatiga		210.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJURENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	1.788.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutka n pengemb angsan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengem bangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintah an Berinteg ritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan ketera mpilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke dalam mengakses permodalan , penguasa an teknologi digital dan meningkatk an produkti vitas, kualitas dan pemasaran produk	UMKM Kota Salatiga	2.020.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
7.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan	-			25,55 persen	1.527.231.000,00						-	1.275.456.000,00	
		[Meningkatnya daya saing UMKM]	Prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan	27.06	24.8	23.00	25.55	1.527.231.000,00	-	-	-	-	-	-	1.275.456.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah unit usaha yang mendapatkan pengembangan usaha mikro	-			200 unit usaha	1.527.231.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama ke mampuan dalam mengakses permodalan , penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk	UMKM Kota Salatiga	-	1.275.456.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				200 Unit Usaha	1.527.231.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangun industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis 02 Penguatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM dan lembaga koperasi terutama dalam meningkatkan permodalan, penguasaan teknologi digital dan meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk	UMKM Kota Salatiga	1.275.456.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
	J U M L A H							9.731.016.000,00							9.685.106.000,00	

BAB V

PENUTUP

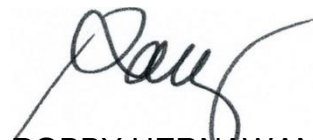
Hasil dari pemikiran strategis berupa rancangan rencana kerja 2026 ini mencakup keputusan yang diambil berkaitan dengan nilai-nilai strategis, visi, misi dan strategi organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga. Agar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan lancar, Dinas Koperasi UKM akan memfokuskan pada fungsi regulasi dan fasilitasi untuk legalitas dan peningkatan kemampuan manajerial, skill dan peningkatan pemasaran demi meningkatkan perekonomian rakyat.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku.

Selanjutnya dengan disusunnya Rancangan Rencana Kerja ini dapat memberi manfaat kepada pihak yang membutuhkan, dan disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2026.

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan yang ada, Rancangan Rencana Kerja 2026 ini jika diperlukan akan dilakukan penyesuaian yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja ataupun dalam Perubahan Rencana Kerja 2026.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan hasil sebagai berikut :

- Kesatu : sistematika penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, paling sedikit memuat :
1. Pendahuluan;
 2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 5. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan rancangan Renja Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen rancangan akhir Renja Tahun 2026 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada RKPD di tetapkan.

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
Kota Salatiga



Dr. BAYU JOKO MULYONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750401 100312 1 008

Koordinator Tim Verifikasi Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Kabid Perenc. Ekbang BAPPEDA
Kota Salatiga

NUR KHOLIS, ST, MT
NIP. 19770704 200604 2 001



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Jalan Dipomenggolo Rejosari Salatiga Kode Pos 50716

Telp.(0298)3419274 Faks.(0298) 3419274 situs <http://dinkopukm.salatiga.go.id>

Surat elektronik dinkopukm@salatiga.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA SALATIGA

Nomor : 800/039/SK/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan pedoman untuk arah pembangunan secara terarah, berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan melalui Koperasi dan UMKM, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

b. bahwa dalam rangka penyusunan Renstra dan Renja perlu ditunjuk Tim Penyusun Renstra dan Renja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Tim Penyusun Renstra dan Renja perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga;

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, bertugas:
- Menyiapkan dan menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - Menyiapkan dan menyusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - Melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal, 10 Maret 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH,
KOTA SALATIGA,

BAYU JOKO MULYONO

Tembusan:

1. Wali Kota Salatiga (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
4. Segenap Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA
SALATIGA
NOMOR : 800 1039 / SK / 2025
TANGGAL : 10 MARET 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA SALATIGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah	Wakil Ketua
4	Kepala Bidang Koperasi	Sekretaris
5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
6	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7	Pengawas Koperasi Ahli Muda	Anggota
8	Staf pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kota Salatiga


BAYU JOKO MULYONO

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Renja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	✓		Ada	
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	✓			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓		mengacu Renstra 25-29	Sudah diperbaiki hal 38
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	✓		ada	Hal 38
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	✓		ada	Hal 44
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	✓		ada	Hal 34
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	✓			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.		✓	Akan di sahkan setelah perbaikan ini	

Lampiran 2 :
Berita Acara Hasil Verifikasi Renja PD
Tahun 2026

Formulir E.71
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kota Salatiga

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup kabupaten/kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta mengacu pada RKPD provinsi dan RKP.	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah belum mengacu pada Renstra 2025-2029 (sudah di TL pada Bab III)
2.	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup kabupaten/kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional	Untuk program kegiatan mendukung prioritas kota, prov dan nasional belum ada (sudah di TL hal 45)

Formulir Verifikasi Sistematika Renja PD Tahun 2026

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kota Salatiga

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
I.1	Latar belakang	Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja PD Tahun 2026 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renja PD	✓		
I.2	Dasar hukum penyusunan	Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2026, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.	✓		- Tambahkan perda provinsi jawa tengah tentang RPJPD dan RPJMD (sudah di TL hal 3) - Hapus RPD provinsi dan kota karena sudah tidak digunakan - Tambahkan Perda 7/2025 ttg RPJMD 25-29 Kota Salatiga
I.3	Maksud dan tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renja PD	✓		
I.4	Sistematika penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renja PD	✓		
II.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 & Capaian Renstra PD Tahun 2024	Tabel evaluasi Renja Tahun 2024 Tabel T-C. 29	✓		
II.2	Analisa Kinerja Pelayanan	IKU, SPM, IKK, Uraian Indikator yang belum memenuhi target Tabel T-C. 30	✓		
II.3	Permasalahan dan Isu Strategis PD	1. Sejauh mana Tingkat kinerja PD dan hal kritis terkait pelayanan; 2. Permasalahan dan hambatan yg dihadapi; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi misi KaDa, tuj dan sasaran Pemda dan program prioritas; 4. Tantangan dan peluang; 5. Formulasi isu penting berupa rekomendasi dan catatan dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun n.	✓		- Tambahkan poin nomor 3 dan 4 sebagaimana penjelasan disamping (sudah di TL hal 21)

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		Isu strategis sesuai dengan menyimpulkan dari: a. Permasalahan b. Indikator yang belum dicapai	✓		
II.4	Review terhadap RKPD	Tabel review RKPD dan Analisis Kebutuhan Tabel T-C. 31	✓		- Review terhadap RKPD bukan ranwal RKPD, untuk hasil analisis kebutuhan mengacu pada Renstra 25-29 - Penulisan renstra 23-26 agar diganti dengan renstra 25-29 Tabel T-C.31 membandingkan antara RKPD 2026 dengan hasil analisis kebutuhan berdasarkan renstra 25-29, untuk diperbaiki kembali. (sudah di TL hal 26) Perlu perbaikan judul tabel
II.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; Tabel T-C.32	✓		Berisi data usulan dari Pokir, Musrenbang maupun Hibah, harap dilengkapi pada tabel T-C.32 (sudah di TL hal 33)
III.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.	✓		Pada telaah terhadap kebijakan provinsi harap memperhatikan acuan periodisasi dokumen menggunakan tahun 25-29 (sudah di TL hal 35)
III.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2026	Tujuan dan sasaran mengacu pada dokumen Renstra 2025–2029	✓		Tujuan sasaran disesuaikan dengan Renstra 25-29 (sudah di TL hal 38)

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
III.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada dokumen Renstra 2025–2029 Berisikan Penjelasan mengenai: 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan; 3. Penjelasan jika rumusan program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; 4. Melampirkan rencana program dan kegiatan berdasarkan pengerjaan tabel T-C.33	✓		Belum ada sub bab ini pada dokumen, untuk dilengkapi sebagaimana penjelasan poin 1-4 disamping (sudah di TL hal 41)
IV.1	Rencana Kerja dan Pendanaan	beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif (cetak renja dari SIPD RI)	✓		- Uraian garis besar program, kegiatan dan sub kegiatan beserta tabel T-C.33 pindahkan pada Bab III - Pada bab ini cukup Tambahkan cetak renja dari SIPD RI (sudah di TL 60) Tambahkan narasi berisi uraian garis besar rencana kerja dan pendanaan
V	Penutup	Bab ini memuat diantaranya 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan. 3. Rencana tindak lanjut.	✓		TTD oleh Wali Kota Salatiga tanpa gelar (sudah di TL)